



ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Jessika Kaletuang¹; Djuraidj Rumiki²; Alvin .I.Sentinuwo³

AKP GMIST Tahuna¹²³

Email: jurajarrum@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dalam KTI ini dilatar belakangi untuk kegiatan pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Rumusan masalah dalam penulis KTI ini adalah bagaimana Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif dan dengan data primer sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang dijadikan tempat penelitian serta didukung dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sejumlah literature buku dan internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Analisis varians belanja selama 2019-2020 secara umum dikatakan baik, (2) Analisis pertumbuhan belanja daerah selama 2019-2020 secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif, (3) Analisis keserasian belanja daerah terlihat tidak seimbang dan (4) Efisiensi belanja daerah bahwa realisasi anggaran belanja tidak terdapat presentase yang melebihi 100%. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Kinerja badan pengelolaan keuangan pada tahun 2019-2020 dapat dikatakan telah melaksanakan kegiatannya dengan baik dalam arti realisasi lebih kecil dari anggaran yang diberikan, maka diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada periode berikutnya sehingga kinerja keuangan belanja dapat dikatakan baik, dan seimbangkan belanja operasi dengan belanja modal jangan hanya memprioritaskan pada belanja operasi.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Belanja Daerah, Efisiensi

PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga keutuhannya.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Pengukuran Kinerja Keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Faktor Keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengolaannya maka semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Efisien berarti pengguna dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal sedangkan efektif berarti pengguna anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan public.

Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu, (1) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (2) untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, (3) untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil merata, dan berkesinambungan. Apabila pemerintah mampu mengelola potensi daerah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya

keuangan secara optimal maka pemerintah daerah telah dianggap mampu untuk menjalankan kewajibannya. Kinerja keuangan belanja daerah dapat dilihat dari keberhasilan pengelolaan potensi-potensi tersebut dan juga ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih kecil dan lebih besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek –proyek daerah dalam periode waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan belanja daerah dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Pengertian Kinerja (Performance) Pegawai Pengertian ditinjau secara etimologi kinerja atau *performance* berasal dari bahasa Inggris dan menurut *The Scriver-Bantam English Dictionary*, terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979), yaitu: *Performance* berasal dari akar kata “*to perform*” yang mempunyai beberapa “*Entries*” adalah sebagai berikut: *To do or carry out; execute*. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. *To discharge of fulfil; as a vow*. Memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar. *To execute or complete an undertaking*. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab. *To do what is expected of a person or machine*. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Secara terminologi pengertian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: Kinerja adalah kesediaan seseorang/kelompok melakukan sesuatu kegiatan, menyempurnakannya sesuai tanggungjawabnya dengan hasil yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan *performance* sebagai kata benda (*noun*) dimana salah satu enry-nya adalah hasil dari suatu pekerjaan (*thing done*), maka pengertiannya adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan normal dan etika. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kinerja adalah prestasi yang 71 dicapai dan merupakan hasil kerja seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Menurut Wayne C. Parker dan Arta Sadjiarto menyebutkan beberapa manfaat yang dilakukan dalam pengukuran Kinerja Keuangan, yaitu: (1) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan mutu pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang diambil organisasi dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran Kinerja Keuangan ini akan memungkinkan organisasi untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu, serta dapat juga dipilih metode pengukuran

Kinerja Keuangan untuk melihat kesuksesan program yang ada. (2) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas internal. Adanya pengukuran Kinerja Keuangan ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini organisasi, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggung jawab kepada pihak legislative. Oleh sebab itu disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*. (3) Pengukuran kinerja keuangan meningkatkan akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi Kinerja Keuangan organisasi kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran Kinerja Keuangan yang baik. (4) Pengukuran Kinerja Keuangan mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur Kinerja Keuangan dan kemampuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai objektif. Dan (5) Pengukuran Kinerja Keuangan memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumber daya secara efektif. Berdasarkan manfaat pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah di atas, terlihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat berguna dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan perencanaan strategi dan penetapan tujuan, serta memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih

yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurang kas rekening Kas Umum daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten / kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu antara pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Klasifikasi belanja daerah berdasarkan Pemendagri No.13 Tahun 2006 adalah: (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan pemerintah terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian, kebutuhan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. (2) Klasifikasi belanja menurut fungsi. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keseluruhan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Negara terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan perlindungan sosial. (3) Klasifikasi belanja menurut organisasi. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. (4) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Klasifikasi belanja menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Tidak Langsung terdiri dari: (1) Belanja Pegawai. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. (2) Belanja Bunga. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga uang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang. (3) Subsidi. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. (4) Belanja Hibah. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (5). Bantuan Sosial. Bantuan sosial adalah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang/jasa barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (6). Belanja Bagi Hasil. Belanja bagi hasil adalah digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (7). Bantuan Keuangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada daerah dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. (8). Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dipikirkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerima daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan. Belanja langsung terdiri dari: (1) Belanja Pegawai. Belanja pegawai dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. (2) Belanja Modal. Belanja modal adalah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan pembangunan, jalan, irigasi; dan jaringan dan asset tetap lainnya.

Menurut Mahmudi Analisis kinerja belanja daerah dilakukan untuk menelaah atau mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan

belanja daerah. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa: (1) Analisis Varians Belanja Daerah. Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka kinerja keuangan daerah dapat dinilai baik.

Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: (1) Selisih disukai disukai (*favorable varians*) yaitu jika realisasi belanja lebih dari anggarannya. (2) Selisih tidak disukai (*unfavourable varians*) yaitu jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya.

Rumus untuk menghitung varians belanja dijelaskan sebagai berikut:

Varians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja

Menurut Halimpertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapat yang seimbang.

Menurut Mahmudi pertumbuhan belanja adalah kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan selain untuk menilai pos belanja dapat pula digunakan untuk menilai pertumbuhan asset, utang, ekuitas, pendapatan, dan sebagainya. Analisis pertumbuhan belanja daerah berguna untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah sendiri biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, pertumbuhan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Kenaikan wajar atau tidaknya perlu melihat beberapa hal yang disebutkan sebelumnya dan alasan kenaikan belanja terjadi, apakah karena kenaikan internal yang relative terencana dan terkendali ataukah faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah.

Rumus untuk menghitung pertumbuhan belanja daerah dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1}$$

Analisis keserasian belanja daerah merupakan analisis yang dimana titik focus analisis berada pada 3 (tiga) fungsi utama anggaran, yaitu sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi.

Menurut Mahmudi keserasian belanja adalah keseimbangan antar belanja. Keserasian belanja bagi

pemerintah daerah bermanfaat dalam mengalokasikan keseluruhan belanja sesuai dengan kebutuhan rencana kerja anggaran. Dengan adanya keserasian belanja maka setiap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja yang menjadi prioritas belanja sesuai peruntukannya. Analisis keserasian belanja daerah meliputi: (1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja. Belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah. Menurut Mahmudi rumus untuk menghitung belanja operasi terhadap total belanja dijelaskan sebagai berikut;

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang. Menurut Mahmudi rumus untuk menghitung belanja modal terhadap total belanja dijelaskan sebagai berikut;

$$\text{Rasio belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}}$$

Menurut Mahmudi, rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, Sebaliknya jika lebih dari 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Rumus untuk menghitung efisiensi belanja dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Data menurut sifatnya di bagi menjadi dua yaitu: (1) Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka yang dalam penelitian ini digunakan untuk menunjang hasil penelitian. (2) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang dalam penelitian ini digunakan untuk menunjang hasil penelitian. Laporan Realisasi

Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2020.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Varians Belanja Daerah. Varians Belanja merupakan selisih antara realisasi belanja dengan belanja yang dianggarkan. Menurut Mahmudi rumus untuk menghitung varians belanja dijelaskan sebagai berikut:

Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah. Pertumbuhan Belanja Daerah merupakan belanja yang dialokasikan pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Menurut Mahmudi rumus untuk menghitung pertumbuhan belanja daerah dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - 1}$$

Analisis Keserasian Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan anatar belanja. Agar fungsi anggaran tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Dalam Analisis Keserasian Belanja Daerah antara lain berupa: (1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja. Belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah. Menurut Mahmudi rumus untuk menghitung belanja operasi terhadap total belanja dijelaskan sebagai berikut;

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal dalam tahun anggaran bersangkutan. Sifat dari belanja ini adalah jangka menengah dan panjang, selain itu belanja modal tidak rutin. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah biasanya akan memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi. Penyebab terjadinya adalah pemerintah daerah yang memiliki tingkat pendapatan rendah akan berorientasi untuk melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang. Menurut Mahmudi rumus untuk menghitung belanja modal terhadap total belanja dijelaskan sebagai berikut;

$$\text{Rasio belanja modal terhadap total belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}}$$

Analisis Efisiensi Belanja Daerah. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio

efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah antara realisasi belanja dengan total belanja. Menurut Mahmudi rumus untuk menghitung efisiensi belanja dijelaskan sebagai berikut;

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Efisiensi Belanja} \\ &= \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\% \end{aligned}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis belanja daerah yang terbagi atas analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. Analisis daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Analisis Varians Belanja

$$\begin{aligned} & \text{Varians Belanja Tahun 2019} \\ &= 1.029,539,085,077,39 - 1,099,319,522,633,97 = - \\ & 69,783,438,557,55 \\ & \text{Varians Belanja Tahun 2020} \\ &= 946.161.206.316 - 996.859.185.787 = -50,697, \\ & 979,471,67 \end{aligned}$$

Analisis varians daerah menunjukkan bahwa anggaran belanja lebih besar dari pada realisasi belanja, jadi hasilnya adalah minus(-). Anggaran 2019 yang tidak terpakai adalah -69,783,438,557,55 dan 2020 adalah -50,697,979,471,67, 2020 mengalami penurunan.

Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Belanja Tahun 2019 dan 2020} \\ &= \frac{946.161.206.316,00 - 1,029,536,084,077,39}{1,029,536,084,077,39} \\ &= \frac{(83,374,877,761)}{1,029,536,084,077} \\ &= 0.0809829583 \end{aligned}$$

Diartikan di atas bahwa pertumbuhan belanja daerah selama 2019- 2020 secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Artinya mengalami kenaikan rata – ratasebesar 0,0809829583 atau 8, 09%

Analisis Keserasian Belanja

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja tahun 2019

$$= \frac{667,416,456,744,39}{1,099,319,522,633,94} = 0,6071178061$$

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2020

$$= \frac{606.090.554.661}{996.859.185.787,67} = 0.6080001702$$

Dijelaskan di atas bahwa rasio belanja operasi terhadap total belanja tahun 2019-2020. Realisasi belanja operasi lebih kecil dari pada total belanja daerah, jadi hasil 2019 sebesar 0.6071178061 atau

60,7% dan tahun 2020 sebesar 0.6080001702 atau 60,8%.

Analisis Belanja Modal terhadap total belanja

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 2019} \\ &= \frac{185,700,878,225,00}{1,099,319,522,633,94} = 0.1689234789 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 2020} \\ &= \frac{123.769.050.560,00}{996.859.185.787,67} = 0.1241590109 \end{aligned}$$

Tabel di atas menjelaskan bahwa rasio belanja modal terhadap total belanja 2019-2020 lebih kecil realisasi belanja modal dibandingkan total belanja daerah, jadi hasil tahun 2019 sebesar 0.1689234789 atau 16,8% dan tahun 2020 sebesar 0.1241590109 atau 12,4%.

Analisis Efisiensi Belanja Daerah

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2019} \\ &= \frac{1,029,536,084,077}{1,099,319,522,633} \times 100\% = 93,6\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2020} \\ &= \frac{946.161.206.316,00}{996.859.185.787,67} \times 100\% = 94,9\% \end{aligned}$$

Rasio efisiensi belanja tahun 2019, realisasi belanja lebih kecil dari pada anggaran belanja, begitu juga tahun 2020, jadi hasil tahun 2019 adalah 93,6% dan tahun 2020 adalah 94,9%. Realisasi anggaran anggaran tidak terdapat presentase yang melebihi 100%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja keuangan belanja daerah di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di lihat dari varians belanja selama 2019-2020 secara umum dapat dikatakan baik. Artinya realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang diberikan.

Kinerja keuangan belanja daerah di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dilihat dari pertumbuhan belanja selama 2019-2020 secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Artinya mengalami kenaikan rata- rata 0,0809829583 atau 8, 09%

Kinerja keuangan belanja daerah di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dilihat dari keserasian belanja daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja operasi dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk belanja modal. Berdasarkan kinerja belanja daerah dapat dinilai tidak seimbang dalam keserasian belanja ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih memprioritaskan porsi belanjannya untuk belanja operasi dari pada belanja modal.

Kinerja keuangan belanja daerah di badan pengelolaan dan pendapatan daerah dapat dilihat dari efisisensi belanja daerah bahwa realisasi.

Kinerja badan pengelolaan keuangan pada tahun 2019-2020 dapat dikatakan telah melaksanakan kegiatannya dengan baik dalam arti realisasi lebih kecil dari anggaran yang diberikan, maka diharapkan dapat dipertahankan atau ditingkatkan pada periode berikutnya sehingga kinerja keuangan belanja dapat dikatakan baik, dan seimbangkan belanja operasi dengan belanja modal jangan hanya memprioritaskan pada belanja operasi.

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang periode waktu penelitian lagi rasio yang mungkin dapat mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten kepulauan sangihe. Sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Barbakem, D. I., Tinangon, J. J., & Sabijono, H. (2018). Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(01).
- David, R. (2018). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sitaro. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1).
- Deborah, P. J., & Mangantar, M. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(1).
- Faisal, A., Samben, R., & Pattisahusiwa, S. (2017). Analisis kinerja keuangan. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 14(1), 6-15.
- Hamid, H. (2020). *Manajemen Pemerintahan Daerah*.
- Kamaroellah, R. A., & MSi, A. (2014). *Manajemen Pemerintahan Daerah (Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Kinerja)*.
- Kementrian Keuangan RI. *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Liando, G. Y., & Elim, I. (2016). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (lra) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Patompo, D. A., & Untu, V. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Santosa, O., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). Analisis kinerja keuangan pada dinas pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset (DPPKA) kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3).
- Wangka, S., Taroreh, F. J., & Lambut, A. K. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2014-2018* (Doctoral Dissertation, Universitas Katolik De La Salle).